



KOMISI I DPR RI



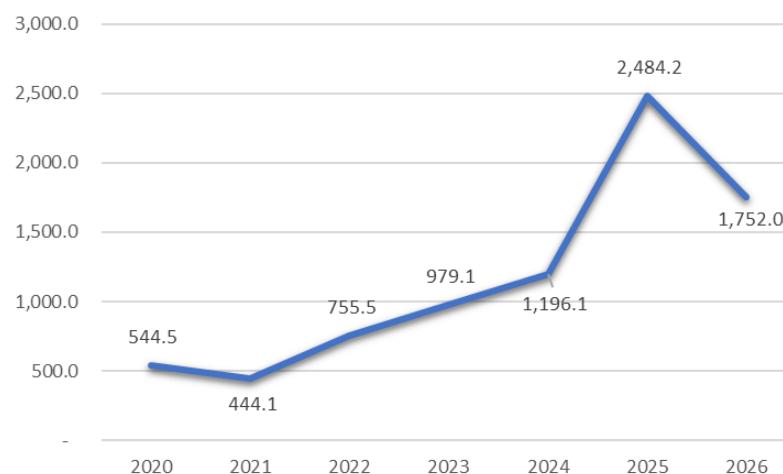
Analisis
PAGU ANGGARAN
2025

CRITICAL NOTES ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2026

Realisasi anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) sepanjang tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Dari Rp544,5 miliar di tahun 2020, realisasi anggaran Bakamla meningkat menjadi sebesar Rp1.196,1 miliar di tahun 2024 dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp162,9 miliar atau 25,86 persen setiap tahunnya.

Pagu anggaran Bakamla di awal tahun 2025 menurun sebesar Rp111,39 miliar atau 9,31 persen menjadi sebesar Rp1.084,7 miliar dibandingkan realisasi anggaran Bakamla tahun 2024. Anggaran Bakamla di tahun 2025 kembali terjadi penurunan imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Besaran efisiensi anggaran Bakamla sebesar Rp354,8 miliar atau 32,71 persen sehingga anggaran Bakamla tahun 2025 menjadi sebesar Rp729,9 miliar. Adapun Bakamla mendapat penambahan anggaran sehingga pagu anggaran Bakamla tahun 2025 meningkat tajam menjadi sebesar Rp2.730,7 miliar. Dengan nilai tersebut, maka *outlook* realisasi belanja Bakamla di tahun 2025 sebesar Rp2.484,2 miliar (Gambar 1).

Gambar 1. Realisasi 2020-2024, *Outlook* 2025 dan Pagu Anggaran 2026 Bakamla



Sumber: LKPP 2024, NK APBN 2024-2025, NK RAPBN 2026, diolah

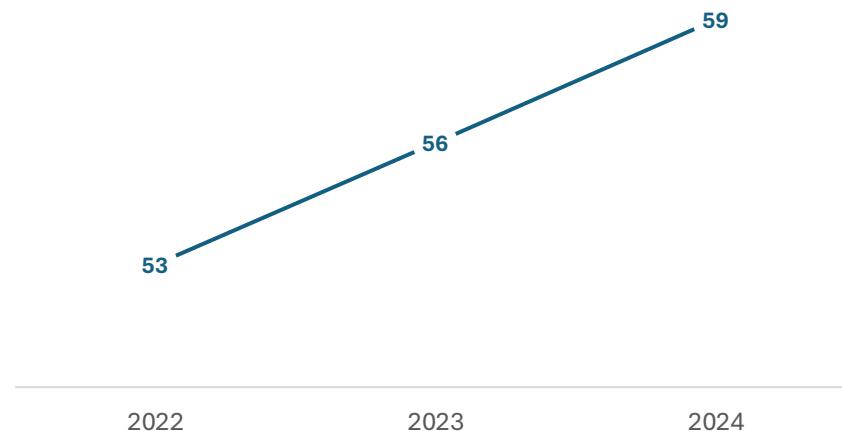
Pagu anggaran Bakamla di tahun 2026 sebesar Rp1.752 miliar. Pagu anggaran tersebut menurun sekitar Rp732,2 miliar atau 29,47 persen dibanding *outlook* 2025. Sebesar 87,02 persen pagu anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung prioritas nasional antara lain melalui kegiatan sarana keamanan dan keselamatan laut pendukung keberhasilan operasi laut, *national Maritime Security System* dan pembangunan stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029), alokasi anggaran tahun 2026 salah satunya ditujukan untuk menjalankan program prioritas nasional “Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi”, dengan sasaran “Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia” dan Indeks Keamanan Laut Nasional sebagai indikator sasaran.

Perkembangan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) 2022-2024

Pengukuran IKLN dilakukan untuk mengetahui tingkat kondisi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. IKLN yang diukur pada tahun 2024 menggunakan data tahun sebelumnya, yakni tahun 2023. Demikian juga perhitungan IKLN tahun 2022 dan tahun 2023. Pengumpulan data dalam perhitungan IKLN berasal dari beberapa kementerian/lembaga, di mana salah satunya adalah Bakamla. Secara umum, perkembangan nilai IKLN dari tahun 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan Nilai IKLN 2022-2024



Sumber: Bakamla 2025, diolah

Walaupun nilai IKLN meningkat setiap tahun, realisasi nilai IKLN tahun 2024 sebesar 59 berada di bawah target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 sebesar 60. Jika dilihat pada masing-masing dimensi pembentuk IKLN, terdapat beberapa dimensi yang perlu ditingkatkan secara khusus oleh Bakamla untuk dapat mendongkrak laju peningkatan perkembangan nilai IKLN. Dimensi kapasitas patroli dan dimensi kapasitas pemantauan merupakan beberapa dimensi dalam IKLN yang dapat dikendalikan langsung oleh kementerian/lembaga terkait karena pengukurannya berdasarkan hasil kinerja internal.

Pertama, dimensi kapasitas patroli. Kapasitas patroli udara Bakamla menghadapi beberapa keterbatasan. Jumlah hari patroli pesawat dan/atau helikopter yang dilakukan oleh Bakamla tahun 2023 hanya 90 hari atau 30 persen dari target referensi sebesar 300 hari (Tabel 1). Rendahnya frekuensi patroli udara yang dilakukan Bakamla disebabkan oleh rendahnya jumlah aset pesawat dan/atau helikopter yang dimiliki Bakamla. Jumlah pesawat dan/atau helikopter hanya satu unit atau 4,2 persen dari target referensi sebesar 24 unit. Cakupan area pesawat dan/atau helikopter juga tidak mencapai target referensi tahun 2023.

Tabel 1. Kapasitas Patroli Bakamla 2023

Subdimensi	Riil	Referensi	Persentase
Hari Patroli Pesawat dan/atau Helikopter	90	300	30.0
Hari Patroli Kapal	142	240	59.2
Aset Pesawat dan/atau Helikopter	1	24	4.2
Aset Kapal Patroli	31	60	51.7
Cakupan Area Pesawat dan/atau Helikopter (km2)	1,927,882	6,400,000	30.1
Cakupan Area Kapal (km2)	3,692,780	6,400,000	57.7
Target Area yang menjadi Prioritas Pengawasan	22	36	61.1

Sumber: Bakamla 2025, diolah

Kapasitas patroli laut Bakamla juga memiliki sejumlah keterbatasan. Bakamla hanya memiliki 31 unit kapal patroli dari target 60 kapal yang ditetapkan (Tabel 1). Aset ini dimanfaatkan oleh Bakamla untuk melakukan patroli laut sejumlah 142 hari patroli kapal dengan cakupan area kapal seluas 3.692.780 km², di mana masing-masing kinerja tersebut masih di bawah target referensi. Dengan keterbatasan aset yang ada, Bakamla hanya mampu menjangkau 22 dari 36 target area yang menjadi prioritas pengawasan.

Kedua, dimensi Kapasitas Pemantauan. Kapasitas pemantauan Bakamla belum mencapai kondisi yang ideal. Bakamla tercatat memiliki 18 stasiun pemantauan atau sebesar 51,4 persen dari target referensi tahun 2023 sebesar 35 stasiun (Tabel 2). Namun, cakupan area yang terjangkau oleh stasiun pemantauan jauh di bawah persentase tersebut, yakni hanya seluas 172.909 km² atau 2,7 persen dari target referensi seluas 6.400.000 km². Hal ini menunjukkan adanya indikasi kekurangan dalam hal infrastruktur yang mampu meliputi wilayah perairan yang luas. Terkait dengan aktivitas pembinaan, di tahun 2023 Bakamla baru mampu menyasar 7 kelompok masyarakat pesisir atau 17,5 persen dari target referensi.

Tabel 2. Kapasitas Pemantauan Bakamla 2023

Subdimensi	Riil	Referensi	Persentase
Stasiun Pemantauan	18	35	51.4
Cakupan Area Stasiun Pemantauan (km2)	172,909	6,400,000	2.7
Pembinaan Masyarakat Pesisir dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut	7	40	17.5

Sumber: Bakamla 2025, diolah

Critical Notes Alokasi Anggaran 2026 Guna Mewujudkan Target Indeks Keamanan Laut Nasional di 2029

Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keamanan lautnya, walaupun dengan adanya penurunan akselerasi. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan target nilai IKLN tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 64 (Kementerian PPN, 2025), kendati hanya berjarak 5 poin dari nilai IKLN tahun 2024 sebesar 59. Hal ini berarti hanya dibutuhkan pertumbuhan nilai IKLN sebesar 1 poin per tahun untuk dapat mencapai target nilai yang ditetapkan,

di bawah rata-rata pertumbuhan nilai IKLN 2022-2024 sebesar 3 poin per tahun.

Walaupun target 2029 yang ditetapkan tergolong rendah, namun pencapaian target IKLN membutuhkan peran yang optimal dari beberapa kementerian/lembaga, termasuk Bakamla. Untuk dapat mendorong peningkatan nilai IKLN, Bakamla perlu memperkuat nilai dimensi-dimensi pembentuk IKLN, antara lain dimensi kapasitas patroli dan kapasitas pemantauan. Penguatan kapasitas patroli dan kapasitas pemantauan akan turut memperkuat keempat dimensi pengendalian, yaitu pengendalian kejahatan laut, pelanggaran laut, pencemaran laut, dan kecelakaan laut.

Komisi I DPR RI perlu mendorong penggunaan alokasi anggaran Bakamla 2026 salah satunya difokuskan untuk meningkatkan kapasitas patroli, antara lain melalui peningkatan aset pesawat dan/atau helikopter maupun kapal patroli. **Komisi I DPR RI juga perlu mendorong Bakamla untuk meningkatkan kapasitas pemantauan**, antara lain melalui peningkatan cakupan area stasiun pemantauan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur stasiun pemantauan yang dimiliki Bakamla guna mendukung tugas pemantauan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bakamla. (2025). Laporan Kinerja Bakamla RI Tahun 2024.
- Bakamla. (2023). Revisi Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2020-2024.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 Audited.
- Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2024-2026.



Analisis **PAGU ANGGARAN** 2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id